

POHON KINERJA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI NTB

MISI 6 RPJMD	NTB AMAN DAN BERKAH MELALUI PERWUJUDAN MASYARAKAT MADANI YANG BERIMAN,BERKARAKTER DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN
TUJUAN RPJMD	
ISU STRATEGIS ESELON 2	BELUM EFEKTIFNYA PENYUSUNAN FASILITASI DAN EVALUASI PRODUK HUKUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA, PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM LITIGASI DAN NON LITIGASI, UJI MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DOKUMENTASI DAN NASKAH HUKUM LAINNYA
SASARAN STRATEGIS ESELON 2	MENINGKATNYA EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM

ESELON II KEPALA BIRO	SASARAN (IKU)
	MENINGKATNYA EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
	INDIKATOR KINERJA
	Persentase Hasil Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Provinsi yang ditindaklanjuti
	Persentase Hasil Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti
	Persentase Hasil Penanganan Litigasi, Non Litigasi dan HAM, Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya yang ditindaklanjuti

ESELON III KEPALA BAGIAN	SASARAN	SASARAN	100%	SASARAN
	Meningkatnya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Provinsi	Meningkatnya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota		Meningkatnya Penanganan Litigasi, Non Litigasi dan HAM, dokumentasi dan naskah hukum lainnya
	INDIKATOR	INDIKATOR		INDIKATOR
	Persentase Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi yang terbentuk	Persentase Hasil Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kab./Kota		Persentase Penanganan Litigasi, Non Litigasi dan HAM, Persentase Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Yang Ditindaklanjuti Menjadi Naskah Kerjasama, Persentase Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan HAM di Provinsi NTB
	TARGET	TARGET		TARGET
	100%	100%		100%
	PROGRAM	PROGRAM		PROGRAM
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

ESELON IV	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN	SASARAN
	Terbentuknya Produk Hukum Daerah	Terbentuknya Produk Hukum Daerah	Terselenggaranya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kab./Kota Pulau Lombok	Terselenggaranya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kab./Kota Pulau Sumbawa	Terlaksananya Penanganan Kasus-kasus Hukum Pemerintah Daerah (Pemda) baik Perdata maupun Tata Usaha Negara (PTUN), dan Uji Materi.	- Terlaksananya Fasilitasi/ Mediasi Perkara Non Litigasi (Pengaduan Masyarakat)	- Tersedianya Himpunan Produk Hukum, Informasi Hukum pada Jaringan Dokumentasi Hukum (JDIH) dan Terwujudnya Aparatur dan Masyarakat yang taat Hukum

PELAKSANA

ASN

KEGIATAN

Jumlah bahan yang digunakan dalam penyusunan rancangan Produk Hukum.

KEGIATAN

Jumlah bahan yang digunakan dalam penyusunan rancangan Produk Hukum.

INDIKATOR

Jumlah Penyusunan Produk Hukum Pengaturan yang terbentuk

TARGET

10 Perda dan 30 Pergub

INDIKATOR

Jumlah Penyusunan Produk Hukum Penetapan yang terbentuk

TARGET

700 Keputusan Gubernur

KEGIATAN

Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan

KEGIATAN

Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan

KEGIATAN

Jumlah bahan yang digunakan dalam penyusunan rancangan Produk Hukum.

KEGIATAN

Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan

INDIKATOR

Jumlah Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang terfasilitasi dan terevaluasi

TARGET

25 Perda/50 Perbup/Perwal

KEGIATAN

Jumlah bahan yang digunakan dalam penyusunan rancangan Produk Hukum.

KEGIATAN

Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan

INDIKATOR

Jumlah Produk Hukum Daerah Kab./Kota yang terfasilitasi dan terevaluasi

TARGET

25 Perda/50 Perbup/Perwal

KEGIATAN

Jumlah bahan hukum yang digunakan dalam fasilitas bantuan hukum

KEGIATAN

Fasilitasi Bantuan Hukum

INDIKATOR

Jumlah penanganan masalah hukum (Litigasi)

TARGET

4 Perkara

KEGIATAN

Jumlah bahan hukum yang digunakan dalam fasilitas bantuan hukum

KEGIATAN

Fasilitasi Bantuan Hukum

INDIKATOR

- Terwujudnya Pemenuhan, Perlindungan dan Penegakan HAM di Provinsi NTB

INDIKATOR

- Jumlah Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM

INDIKATOR

-Jumlah Dokumen Pelaporan Rencana Aksi HAM (RANHAM)

TARGET

- 4 Perkara

TARGET

- 3 Dokumen

KEGIATAN

Jumlah bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan rancangan produk hukum

KEGIATAN

Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan

INDIKATOR

- Terwujudnya Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Pemda yang akurat dan harmonis.

INDIKATOR

- Jumlah Produk Hukum yang Terdokumentasi dan tersosialisasi kepada masyarakat

INDIKATOR

- Jumlah Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerjasama yang Tersusun

TARGET

- 4 Produk Hukum/10 Perda/30 Pergub

TARGET

- 20 Naskah